

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 255,587,9 juta jiwa, tahun 2016 sebesar 258,496,5 juta jiwa, tahun 2017 sebesar 261,355,5 juta jiwa, tahun 2018 sebesar 264 juta lebih sedangkan pada tahun 2019 sebesar 266,911,9 juta jiwa (Bps:2022). Sedangkan untuk angkatan kerja sendiri pada tahun 2015 sebesar 128,301,588 juta jiwa, tahun 2016 sebanyak 127,671,869 juta jiwa, tahun 2017 sebanyak 131,544,111 juta jiwa, di tahun 2018 sebesar 136,442,998 juta jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 138,591,388 juta jiwa (Bps:2022). Angkatan kerja yang sebanyak ini tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pada akhirnya banyak masyarakat untuk bermigrasi.

Migrasi sendiri yang mempunyai arti, pindahnya suatu penduduk yang melewati batas-batas negara yang mempunyai tujuan untuk mencari sumber penghidupan. Biasanya migrasi didorong oleh faktor ekonomi, yang mana orang bermigrasi untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Bentuk-bentuk migrasi spasial yang sering dilakukan adalah perpindahan penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota tertentu. Dari migrasi ini melahirkan sebuah konsep migrasi yang komutasi, migrasi sirkulasi dan juga migrasi permanen. Maksud dari migrasi komutasi merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan pulang-pergi (bolak-balik) setiap hari. Menurut migrasi sirkulasi mempunyai arti, sebuah migrasi yang dilaksanakan dengan cara meninggalkan kampung halamannya yang lebih

dari 2 hari serta kurang dari 6 bulan. Sedangkan arti dari migrasi permanen itu sendiri merupakan sebuah migrasi yang dilaksanakan dengan menetap di tempat tujuan, dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan (Rudiarto, 2013: 334-335). Masyarakat Indonesia melakukan migrasi tidak hanya dari desa ke kota dalam satu negara melainkan juga migrasi antar negara atau juga disebut dengan migrasi internasional.

Mayoritas negara membuka diri dengan arus migrasi internasional, ini merupakan sebuah wujud dari globalisasi. Disisi yang lain, tidak sedikit suatu negara yang menganggap migrasi internasional berkaitan langsung dengan sebuah perbedaan budaya dan menganggapnya sebagai suatu ancaman kedaulatan maupun identitas nasional bagi negara tersebut. Migrasi internasional mempunyai arti sebagai suatu pergerakan perpindahan penduduk yang melingkupi sebuah aspek perubahan tempat tinggal, tujuan dan juga kemauan-kemauan untuk tinggal maupun tidak di negara tujuan tersebut. Disamping itu, kebanyakan sebuah negara memiliki banyak aturan, kebijakan serta hitung-hitungan migrasi di negaranya masing-masing (Dewi, 2013:1-2). Sejarah migrasi internasional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dimulai sejak lama yaitu tepatnya pada saat penjajahan Belanda dan hingga kini masih berlangsung.

Migrasi internasional sebuah kejadian yang beragam dan melibatkan banyak isu, diantaranya adalah isu terkait jaminan keamanan negara dimana ada status hukum, status warga negara dan diskriminasi sosial. Migrasi internasional perlu dianggap sebagai perbuatan dan lebih menitikberatkan pada proses, tidak semata-mata respon dari kondisi tertentu. Ini melihat pada permasalahan migrasi jauh lebih

ribet ketimbang hanya respon penduduk terhadap “ketidaknyamanan”. Salah satu bukti terkait hal ini adalah terlihat jelas, contohnya dilihat secara objektif suatu wilayah “tidak nyaman” baik dari segi ekonomi, sosial maupun segi politik akan tetapi masyarakat tersebut menikmati serta tidak merasakan ketidaknyamanan itu sehingga mereka tidak mau untuk bermigrasi. Semua ini bukan masalah sekedar perhitungan untung maupun rugi semata, melainkan mencakup masalah sosial, budaya serta politik. Dampak langsung dari sebuah teori migrasi klasik untuk menerjemahkan ke dalam migrasi internasional berakibat pada sudut pandang dan juga kebijakan pemerintah bagi pekerja migran sendiri. Arus migrasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri sudah ada sejak lama dan memiliki sejarah yang panjang (Sukamdi, 2007: 115-116). Pertama kali arus migrasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri terjadi pada masa Hindia Belanda atau pada masa penjajahan.

Perkembangan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara sejarah dimulai pada jaman Hindia Belanda, sekitar tahun 1800-an. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan 32.986 orang pekerja migran Indonesia yang berasal dari pulau Jawa untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname. Suriname pada saat itu juga menjadi jajahan Belanda dan kekurangan tenaga kerja. Maksud Belanda mengirimkan pekerja migran Indonesia untuk menggantikan pekerja migran asal Afrika yang pada saat itu telah dibebaskan dari perbudakan. Gelombang awal pemberangkatan pekerja migran Indonesia dari Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia sejumlah 94 orang, sedangkan gelombang selanjutnya berjumlah 614 orang. Mereka sampai di Suriname dengan

menggunakan kapal SS Voorwarts. Pengiriman pekerja migran Indonesia ini terus berjalan hingga pada tahun 1914, pengiriman menggunakan kapal laut yang berjumlah kurang lebih 77 kapal.

Penempatan pekerja migran Indonesia yang menurut kebijakan pemerintah Indonesia secara resmi terjadi pada tahun 1969, ini dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan. Dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia ini juga dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1970 tentang memperkenalkan program antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN). Dengan adanya aturan ini maka penempatan pekerja migran Indonesia diluar negeri melibatkan pihak ketiga yaitu pihak swasta. Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sudah diatur dalam kebijakan penempatan pekerja migran yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini juga termuat satu pasal mengenai penempatan pekerja migran. Kebijakan terkait pekerja migran ini sifatnya hanya kebijakan reaktif dari sebuah migrasi tenaga kerja yang sebelum itu dilaksanakan melalui perorangan maupun lewat jalur tradisional. Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia pada saat itu masih mempunyai sumber daya alam yang berupa minyak sehingga sektor pekerja migran ini belum menjadi sebuah isu yang harus ditangani secara profesional dan juga serius. Dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia membikin sebuah badan koordinasi penempatan pekerja migran Indonesia. Pada tahun 1999 melalui sebuah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999, pengiriman pekerja migran Indonesia dilanjutkan. Kemajuan lebih lanjut terkait penempatan dan perlindungan

pekerja migran Indonesia adalah dengan adanya sebuah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Penempatan pekerja migran Indonesia tambah banyak dan mulai mengalami perubahan dari sektor informal ke sektor formal. Pergeseran yang terjadi belum signifikan akan tetapi ini sudah menjadi sebuah rencana baru bagi pemerintah, untuk dapat menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri (Cadika, 2016: 11-13). Menurut undang-undang nomor 39 tahun 2004 dimana badan yang mengurus tentang pekerja migran adalah badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI).

Setelah lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2017 dimana badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia berubah nama menjadi badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI). Menurut data dari badan perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa, ditahun 2019 pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri sebanyak 276.553 orang. Dengan rincian 133.993 orang bekerja disektor formal dan 142.560 orang bekerja disektor informal, dilihat dari persentase diatas bahwa lebih dari 50% pekerja migran Indonesia bekerja disektor informal. Jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah pekerja migran Indonesia laki-laki sebanyak 85.316 orang dan perempuan sebanyak 191.237 orang. Pengiriman pekerja migran Indonesia ke berbagai negara dimana salah satunya adalah ke Hong Kong. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong pada tahun 2019 sebanyak 70.840 orang (PUSLITFO, 2020: 187–220). Hong Kong menjadi primadona tersendiri bagi tujuan pekerja migran Indonesia selain karena gajinya yang besar tetapi juga bekerja di Hong Kong ada waktu libur diakir pekan

dan bisa digunakan untuk berkumpul dengan teman-teman sesama pekerja migran Indonesia maupun bergabung dengan organisasi yang ada disana.

Di Hong Kong banyak organisasi, baik organisasi daerah, agama, kepenulisan dan lain sebagainya. Salah contoh organisasi kepenulisan di Hong Kong adalah Forum Lingkar Pena Hong Kong (FLPHK). Biasanya pertemuan rutin pada minggu pertama dan juga pada minggu ketiga dijam 10 sampai jam 1 siang. Organisasi ini tidak mengekang anggotanya untuk beraktivitas lain, selain dari organisasi ini (Bayu dan Ida, 2010: 46-47). Ini merupakan sebuah kebebasan yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong dan masih banyak lagi kebebasan yang didapatkan dari majikan di Hong Kong ketimbang bekerja di wilayah timur tengah. Kebebasan yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong sudah sesuai dengan aturan yang sudah dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam deklarasi New York pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 19 September 2016: Perlu kita mengingatkan kewajiban kita menurut hukum internasional untuk mencegah segala bentuk diskriminasi berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, ras, agama, maupun terkait pandangan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya. Namun dibanyak bagian dunia lain, kita masih menyasikan semakin banyak tanggapan xenophobia dan rasisme terhadap para pengungsi dan juga para migran. Hukum internasional telah berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kewajiban sebuah negara untuk menghormati, menghargai, dan melindungi serta memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya serta politik para migran. Mendorong

perancangan kebijakan yang berlandaskan kesetaraan, martabat, mampu menjangkau kaum migran. Seperti yang terjadi pada banyak bidang lainnya, penyusunan kebijakan migran mendapatkan arahan dari hukum hak asasi manusia internasional. Di samping petunjuk lainnya yang sekarang sudah banyak tersedia, meskipun masih tetap saja terdapat wilayah persoalan yang terbilang abu-abu (Guild dan Stefanie Grant, 2018: 69-70). Merujuk pada pekerja migran Indonesia yang ada di negara Hong Kong yang selalu berkumpul maupun berorganisasi di akhir pekan maka kebebasan berkumpul, berserikat dan juga berpendapat sudah terakomodir.

Hong Kong adalah salah satu negara tujuan pekerja migran yang mempunyai aturan lebih baik ketimbang negara tujuan yang lainnya. Dimana pekerja migran Indonesia diberikan kebebasan untuk berserikat dan mendapatkan hak liburnya satu minggu sekali. Sehingga akses untuk melakukan aktifitas diluar rumah majikan sangat terbuka. Dengan situasi yang seperti ini, organisasi pekerja migran Indonesia berkembang di Hong Kong, mulai dari asosiasi tenaga kerja Indonesia (ATKI), Indonesia *migrant worker union* (IMWU), koalisi tenaga kerja Indonesia Hong Kong (KOTKIHO) sampai dengan majelis-majelis pengajian dan lain sebagainya. Dalam konteks pemenuhan hak politik semestinya kondisi tersebut sangat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk memenuhi hak politik pekerja migran, namun pada prakteknya tidak seperti itu karena komitmen politik pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat rendah untuk memenuhi hak politik pekerja migran (Migrant Care, 2014: 113). Tentunya dengan kondisi politik yang baik itu juga mempengaruhi partisipasi politik pekerja

migran Indonesia di Hong Kong dalam menyalurkan aspirasinya dipesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Hajatan besar pemilihan umum secara serentak tahun 2019 dengan seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih akan memilih Presiden dan calon Wakil Presiden telah dimulai. Pemungutan suara yang diadakan terlebih dahulu di luar negeri guna memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan yang berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 14 April 2019 menggunakan 3 metode. Pertama yaitu tempat pemungutan suara yang berada di luar negeri. Kedua, melalui kotak suara keliling dan yang ketiga melalui pos atau surat. Penggunaan metode pos atau surat ialah sebuah metode yang paling banyak digunakan oleh pemilih yang berada di luar negeri sebanyak 40% dari semua daftar pemilih tetap yang berada di luar negeri. Metode selanjutnya adalah dengan menggunakan kotak suara keliling sebanyak 35%, terakhir adalah menggunakan tempat pemungutan suara luar negeri sebanyak 25%. Daftar pemilih tetap diluar negeri secara keseluruhan sebesar 2,06 juta jiwa.

Berdasarkan pengalaman pemilihan umum sebelumnya timbul masalah dari mekanisme pemungutan suara dengan pos cukup banyak. Pada pemilihan umum tahun 2014 menunjukkan bahwa 53% surat suara yang dikirimkan melalui pos tidak sah dikarenakan saat pengiriman ke perwakilan Republik Indonesia tidak melampirkan formulir C4 sebagai syarat keabsahan data. Ini sangat penting untuk disosialisasikan dengan masif kepada pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Selain itu juga tidak kalah pentingnya dan harus belajar pada kejadian di *Hong Kong Gate* yang membuat kacau saat pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2014 di Hong Kong. Antusiasme pekerja migran Indonesia yang tidak terdaftar menjadi pemilih akan tetapi ingin menggunakan hak pilihnya. Panitia pemilihan tidak bisa mengakomodasi karena izin sewa tempat di *Victoria Park* terbatas dan hanya sampai jam 5 Sore. Faktanya memang benar jika selama ini suara pekerja migran Indonesia menjadi rebutan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetisi setiap 5 tahun sekali.

Tetapi ketika mereka sudah jadi pemimpin tidak ada yang memikirkan nasib para pekerja migran Indonesia. Sebenarnya kepada mereka pekerja migran bisa membangun mimpi dan harapan, akan tetapi faktanya tidak demikian. Tidak salah memang jika pemerintah membuat daerah pemilihan khusus buat pemilih diluar negeri sehingga tidak hanya suara mereka saja yang diperebutkan, akan tetapi aspirasi-aspirasi dan keterwakilan mereka diperhatikan (Hidayah, 2019: 10-11). Suara-suara pekerja migran tidak hilang begitu saja dan akan muncul lagi ketika ada pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah hajatan besar negara yang selalu dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi undang-undang dasar (UUD) tahun 1945 bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pemilihan umum diyakini sebagai proses peralihan kekuasaan secara sah dan juga damai dalam negara modern yang mempunyai paham demokrasi. Setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, partisipasi pemilih menjadi sebuah isu menarik untuk diperhatikan. Selain karena berhubungan secara langsung dengan antusiasme, kesadaran warga negara dalam memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Partisipasi

masyarakat dalam memberikan hak pilihnya bisa menentukan orang-orang yang kelak akan duduk pemerintahan (Arniti, 2020).

Zaman modern seperti saat ini pemilihan umum menempati posisi yang sangat penting karena beberapa hal; Pertama, pemilihan umum menduduki peran penting demi keberlangsungan kehidupan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilihan umum menjadi sebuah indikator suatu negara demokrasi. Ada juga yang mengatakan bahwa, dua dari enam ciri-ciri lembaga politik sangat dibutuhkan oleh demokrasi dalam skala yang lebih besar yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan ajang para pejabat yang akan dipilih. Pemilihan umum sendiri mempunyai sifat yang bebas adil dan juga berkala. Ketiga, pemilihan umum sangat penting untuk dibicarakan, terutama dengan implikasi-implikasi yang lebih luas dari pemilihan umum sendiri. Pada masa ini pemilihan umum dijadikan sebagai alat dan juga tujuan dari demokrasi. Pernyataan itu berawal dari kenyataan dilapangan dengan jatuhnya penguasa-penguasa yang otoriter akibat dari pemilihan umum yang mereka danai sendiri, karena mencoba mengganti legitimasi melalui sebuah pemilihan umum (Ranadireksa, 2007).

Masyarakat membikin kontrak sosial dengan pemimpin melalui sebuah pemilihan umum. Saat pemilihan umum rakyat bisa memilih figur yang bisa dipercaya untuk menduduki jabatan publik. Dalam pemilihan umum, rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, secara bebas dan juga rahasia bisa menentukan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan yang dijabat oleh pemimpin saat ini bukan tiba-tiba muncul karena dirinya sendiri, akan tetapi sebuah titipan dari rakyat yang memilih

melalui pemilihan umum. Pada intinya, pemilihan umum merupakan sebuah contoh partisipasi politik warga negara. Aktivitas warga negara biasa untuk mempengaruhi sebuah kebijakan dalam pemerintah. Pada dasarnya pemilihan umum merupakan sebuah cara dan juga sarana yang ada bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang kelak bisa duduk dilembaga perwakilan rakyat demi menjalankan kedaulatan rakyat. Begitu bermaknanya pemilihan umum bagi semua orang, maka pemilihan umum bisa menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang telah digunakan diberbagai penjuru dunia salah satunya adalah Indonesia, yang mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang heterogen. Pemilihan umum memungkinkan banyak pihak bisa terakomodasi keinginannya serta cita-citanya sehingga terwujud sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Setiap warga negara merupakan pemegang tertinggi dalam kedaulatan dan juga menjadi bagian penentu sukses atau tidaknya pelaksanaan dalam pemilihan umum. Pada dasarnya kekuatan pemilihan dari masyarakat yang mampu menentukan nasib negara dan juga bangsa kedepan. Setiap warga negara dan tanpa melihat latar belakangnya seperti ras, suku, jenis kelamin, agama, status sosial, maupun golongan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk mengutarakan pendapat, bersikap secara kritis dengan kebijakan pemerintah dan juga pejabat negara. Hak ini bisa dibilang hak politik yang secara luas bisa langsung diterapkan secara kongkrit dan nyata (Fitriani, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum juga dijelaskan pengertian dari pemilihan umum itu sendiri. Pemilihan umum merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat

untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partisipasi pemilih adalah suatu kebutuhan dalam keberlangsungan demokrasi dan juga sistem politik bebas hambatan ini menjadi bagian yang terpenting dalam sebuah demokrasi. Melaksanakan pemilihan umum dengan cara yang sudah diatur adalah suara rakyat bisa tersalurkan untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada orang untuk mewakili kepentingan rakyat dan menduduki suatu jabatan dipemerintahan. Bagian ini menjadikan partisipasi pemilih sebagai sebuah isu karena besar kecilnya partisipasi berhubungan langsung dengan legitimasi dan kepercayaan warga negara kepada orang yang dikasih tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan dan membuat kebijakan.

Indonesia merupakan sebuah negara demokratis, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Konsep demokrasi dengan model kedaulatan rakyat, maka partisipasi bisa diterjemahkan sebagai hak yang paling dasar dari rakyat untuk bisa terlibat didalam proses politik, baik terlibat secara langsung maupun terlibat secara tidak langsung. Indonesia adalah sebuah negara yang mengakui bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, maka Indonesia membuat pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi demi membentuk sistem kekuasaan sebuah negara yang mempunyai visi berkedaulatan rakyat.

Pemilihan umum merupakan esensi dari sebuah demokrasi yang berupa kedaulatan berada ditangan rakyat dan akan diuji. Meskipun dalam maksud tertentu, ada sebuah penyimpangan seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat misalnya, angka partisipasi politik rakyat sangat kecil. Pada pemilihan umum tahun 2016 angka partisipasi politik hanya mencapai 55%. Berbeda halnya seperti yang terjadi di negara Australia. Pemilihan umum di negara Australia mengharuskan rakyatnya untuk datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos surat suara disetiap pemilihan umum. Kewajiban ini menjadikan negara Australia salah satu negara didunia yang angka partisipasi politik terbesar dalam demokrasi. Saat pemilihan umum negara Australia, tingkat partisipasi politik mampu mencapai angka lebih dari 90% dari daftar pemilih tetap. Pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan bentuk dari partisipasi politik, akan tetapi di Indonesia bentuk partisipasi politik seperti ini memiliki banyak masalah. Indonesia sebagai negara demokrasi yang tergolong baru, memulai reformasi politik ditahun 1998, banyak masalah melingkupi kadar pemilihan umum di Indonesia. Walaupun masih banyak masalah dalam pemilihan umum di Indonesia, namun angka partisipasi politik selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ini terlihat dalam sebuah data dimana angka partisipasi politik dalam pemilihan umum pada tahun 2019 ini berada diangka 81%, sedangkan pada pemilihan umum pada tahun 2014 berada diangka 70%¹. Untuk

¹ Farisa, Chusna, Fitria. KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen. Mei, 27. 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

meningkatkan partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong sangat beragam tantangannya.

Masalah yang muncul dalam pemilihan umum yang terjadi di Hong Kong adalah insiden kericuhan. Kericuhan ini terjadi pada waktu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di lapangan *Victoria Park*, Hong Kong. Pada dasarnya, panitia penyelenggara telah berusaha mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akan tetapi faktanya kericuhan masih terjadi. Kericuhan ini masih bisa kita lihat didalam youtube, media sosial ataupun media berita online yang lainnya. Kericuhan yang disebabkan oleh kecewanya ratusan pekerja migran Indonesia yang sudah mengantri akan tetapi gagal mencoblos dikarenakan tempat pemungutan suara telah ditutup. Penutupan ini bukan tanpa sebab, penutupan ini karena telah berakhirnya izin sewa tempat di *Victoria Park*². Melihat, mencermati masalah demi masalah yang menjadi pemicu sehingga kejadian ini yang bukan saja menjadi perhatian bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong, akan tetapi juga warga negara Hong Kong sendiri.

Para pemangku kebijakan yang berada di Hong Kong melihat masalah pemilihan umum dan juga termasuk mantan anggota panitia pemilihan umum luar negeri dan panitia pengawas pemilihan umum luar negeri Hong Kong yang tahu kejadian saat itu untuk dimintai masukan. Pada kesimpulannya adalah taman *Victoria Park* tempat yang menjadi favorit bagi pekerja migran Indonesia di Hong

²Auliani, Annisa, Palupi. Kronologi Kericuhan Pemungutan Suara di Hongkong. Juli 07, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/07/03533881/Kronologi.Kericuhan.Pemungutan.Suara.di.Hongkong>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022

Kong untuk mengisi waktu libur akhir pekan tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat pemungutan suara. Konsulat Jendral Republik Indonesia bersama pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah panitia pemilihan luar negeri dan juga panitia pengawas pemilihan umum luar negeri sudah sepakat untuk pemungutan suara dilaksanakan di tempat tertutup. Sebagai lokasi terpilih yaitu, *Queen Elizabeth Stadium*, tempatnya tertutup dan mempunyai kapasitas 3.500 tempat duduk yang berada dikawasan *Wanchai* serta satu gedung di kawasan *Kowloon* serta gedung yang terakhir berada di daerah *New Territories*.

Dari tiga daerah itu menjadi tempat berkumpulnya pekerja migran Indonesia di Hong Kong hingga menjadi sebuah pertimbangan utama. Upaya untuk memudahkan pekerja migran Indonesia dalam menggunakan hak konstitusional dalam menentukan pilihannya yaitu memilih calon Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun ke depan. Dari tiga wilayah itu kedepannya ingin dibuat sebanyak 32 unit tempat pemungutan suara untuk memaksimalkan angka partisipasi pemilih di Hong Kong. Pada pemilihan tahun 2019 mempunyai daftar pemilih tetap sebanyak 181.014 orang. Dari jumlah tempat pemungutan suara dan juga daftar pemilih tetap lebih banyak dibandingkan lima tahun sebelumnya yaitu pemilihan tahun 2014 lalu. Dalam pemilihan tahun 2014 yang lalu ada 16 unit tempat pemungutan suara dan ada sekitar 140.000 orang sebagai daftar pemilih tetap³.

³ Ulum, Miftahul. Menilik Persiapan Pemilu 2019 di Hongkong & Ragam Antisipasinya. April 10, 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190410/19/910141/menilik-persiapan-pemilu-2019-di-hongkong-ragam-antisipasinya>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

Bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara dan juga daftar pemilih tetap ini, Konsulat Jendral Republik Indonesia serta panitia pemilihan luar negeri Hong Kong bersemangat untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019. Saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu, tingkat partisipasi pemilih sebesar 16 persen. Pemilihan tahun 2019 panitia menargetkan partisipasi pemilih di atas 50 persen. Penyebabnya adalah tempat pemungutan suara lebih banyak dan juga merata, sedangkan dalam jumlah pemilih juga bertambah banyak. Panitia penyelenggara dalam mempersiapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Hong Kong lancar karena mendapatkan dukungan secara penuh dari pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor.

Sarana dan prasarana yang digunakan termasuk perpanjangan izin sewa gedung tidak menjadi masalah lagi karena madam Carrie memberi instruksi pada pengelola gedung berikut petugas pengamanannya untuk mendukung dengan sepenuh hati supaya pemilihan berjalan dengan lancar. Dalam perhitungan surat suara tidak perlu sewa gedung, karena menurut peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 mengizinkan untuk melakukan perhitungan surat suara dilaksanakan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain izin dari madam Carrie, izin secara resmi juga datang dari pemerintah Republik Rakyat China terkait kegiatan politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Keperluan untuk pemilihan umum dari Indonesia sudah dikirim, semuanya itu bobotnya mencapai 7,2 ton dan dikemas kedalam 362

kantong diplomatik, sesampainya di Hong Kong telah disimpan di tempat yang aman yaitu di kantor konsulat jendral Republik Indonesia di Hong Kong⁴.

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang diatas sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini akan membahas mengenai partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong terkait calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertarung dalam pemilihan umum tahun 2019.

1. Bagaimana partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ditahun 2019?
2. Dimulai dari tahapan apa pekerja migran Indonesia di Hong Kong berpartisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019?
3. Apa faktor utama yang menjadikan pekerja migran Indonesia di Hong Kong ikut partisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019?

⁴ Ilmi, Irfan, M. Menepis Bayang Kelabu di Victoria Park. April 10, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/824173/menepis-bayang-kelabu-di-victoria-park>. Diakses pada tanggal 28 mei 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2019.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian terkait partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak banyak yang melakukannya, khususnya di Indonesia. Harapannya hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam kajian ilmu politik di Indonesia dan juga para pemangku kepentingan yang ada di Indonesia dalam mengambil sebuah kebijakan terhadap pekerja migran Indonesia. Pada penelitian ini juga, menambah referensi tentang kajian mengenai keterlibatan politik pekerja migran Indonesia. Didunia akademis, studi keterlibatan politik pekerja migran Indonesia di Hongkong masih sangat minim, sebab itu penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dalam studi ilmu politik.

1.5 Literatur Review

Literatur terkait partisipasi politik di Indonesia sudah sangat banyak ditemukan dari sudut pandang manapun. Dalam perkembangannya literatur ini mengalami banyak perubahan dan juga modifikasi dalam memaparkan fenomena yang belum diketahui dan dijelaskan pada literatur sebelumnya. Ini semua tidak

terlepas dari kontribusi para sarjana yang berkesinambungan dari waktu ke waktu melakukan estafet penelitian yang mendalam mengenai literatur partisipasi politik pekerja migran Indonesia. Cara untuk melihat dan memperjelas posisi penelitian ini diantara literatur-literatur yang sudah pernah ada sebelumnya, maka akan menguraikan beberapa literatur dan perdebatan para sarjana mengenai partisipasi politik pekerja migran Indonesia.

Literatur review yang berjudul partisipasi migran dalam pemilihan kepala daerah di kota Batam dalam jurnal *Kopasta* yang ditulis oleh Tamama Rofiqah. Tamama mengatakan bahwa dulunya Batam pulau kecil dan juga sepi dengan penduduk asli suku Melayu yang menghuni disekitaran pesisir pantai. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74 tahun 1971 berisi tentang pembangunan di pulau Batam. Didalam surat tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa pulau batam menjadi daerah industri, dikelola secara khusus dengan membikin sebuah badan tersendiri.

Badan dimaksud adalah Otorita Batam yang termuat dalam Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973. Kota Batam memberi harapan bahwa kota ini menjadi sebuah kota bursa tenaga kerja yang menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Akibatnya terjadi arus migrasi ke Batam yang berakibat pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Penduduk yang awalnya hanya suku Melayu saja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu banyak pendatang dari etnis yang lain seperti etnis Jawa, Minang, Batak, serta etnis Tionghoa. Para migran datang ke kota Batam yaitu mencari pekerjaan dengan kehidupan yang layak. Selain itu dari segi usia, usia mereka juga usia produktif yaitu berkisar antara usia 19-25

tahun. Kebanyakan dari mereka hanya lulus sekolah menengah atas atau sederajat. Para migran yang ada di kota Batam dan terlibat dalam agenda-agenda politik adalah mereka yang masuk dalam perkumpulan suku bangsa, partai politik, kebanyakan berusia diatas 35 tahun dan telah menjadi warga di kota Batam.

Dilihat dari segi pendidikan, para migran yang ikut dalam agenda politik adalah mereka yang pendidikan tinggi seperti sarjana maupun pascasarjana. Para migran yang mayoritas adalah remaja serta tingkat pendidikannya sebatas lulus sekolah menengah atas atau sederajat. Ini menjadi salah satu faktor bagi para migran bersikap tidak mau tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, salah satu kebijakannya adalah menyalurkan hak suara pada pemilihan kepala daerah setempat. Faktor etnis atau suku juga menjadi masalah kenapa para migran tidak menyalurkan hak politiknya (Rofiqoh, 2017: 76-81). Ada juga pejabat yang sudah jadi hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarga serta golongannya bukan memikirkan rakyat secara keseluruhan.

Literatur yang kedua mengenai partisipasi politik buruh migran Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai pekerja migran Indonesia) di Malaysia pada pemilihan umum tahun 2009 dan tahun 2014, yang ditulis oleh Suryani dan Ana Sabhana Azmy. Suryani dan Ana menulis tentang meningkatnya partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2014 dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2009. Kenaikan partisipasi politik ini bukan karena mekanisme pelaksanaan pemilu akan tetapi dikarenakan faktor figur yang dianggap dan diharapkan mampu menjadi keterwakilan dan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja migran Indonesia yang selama ini masih terabaikan serta

kurang menjadi prioritas pada agenda pembuatan sebuah kebijakan. Joko Widodo menjadi salah satu calon Presiden membuat harapan baru menjadi motivasi tersendiri yang cukup ampuh bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Mereka tidak ada alasan lagi untuk tidak berperan aktif dalam pemilihan umum pada khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Partisipasi politik pekerja migran Indonesia semakin bertambah dan mereka mempunyai keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum di Malaysia.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik sebagai langkah penting, selain untuk meningkatkan partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Malaysia juga untuk bekal politik dikemudian hari. Pekerja migran Indonesia harus mendapat informasi yang jelas serta akurat supaya mereka bisa ikut sosialisasi politik serta terlibat aktif. Cara yang sesuai untuk penyelesaian sebuah masalah adalah mengenali kebijakan pemerintah itu sendiri. Kebijakan yang sudah dikenali maka akan dapat melindungi, menuntun, serta memahami cara pandangan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi politik pekerja migran Indonesia, yaitu dengan cara penataan dokumen dengan status pekerja migrant Indonesia di Malaysia. Selain itu juga dilakukan perbaikan sistem dan mekanisme pemungutan suara dengan cara menjemput bola serta upaya-upaya lainnya yang efektif (Ana, Suryani, 2017: 316). Walaupun secara angka ada peningkatan partisipasi politik di tahun 2014 ketimbang di tahun 2009 akan tetapi ada yang jauh lebih substansial dari pada itu yaitu kesadaran politik. Pendidikan politik jauh-jauh hari harus diberikan oleh pemerintah kepada pekerja migran Indonesia bukan hanya saat menjelang pemilihan umum saja. Jika kesadaran politik

sudah terbangun dari jauh-jauh hari maka menjelang pemilihan umum akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi.

Literatur selanjutnya dari Maykel Yosua Polii dalam jurnal *Politico* yang judulnya tentang peranan kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa. Selama ini kita hanya mengenal kelompok tani yang tidak sadar dengan politik akan tetapi ada kelompok tani yang sadar dengan politik. Kelompok tani adalah salah satu lembaga sosial yang sangat dekat dengan masyarakat desa, serta menjadi lembaga yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam hal partisipasi politik. Meskipun sebatas lembaga sosial dan bukan lembaga politik, tapi kelompok tani ini bisa mempengaruhi masyarakat secara tidak langsung untuk melek politik dan berdampak pada peningkatan partisipasi politik. Cara yang dipakai kelompok tani untuk mempengaruhi masyarakat hingga pada akhirnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik sangat beragam. Dalam kelompok tani mempunyai cara atau strategi sendiri-sendiri. Strategi itu mulai dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum, membagikan kalender, poster kandidat. Selain itu kelompok tani ini juga mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di desa dan bersinggungan langsung terhadap masyarakat desa sehingga masyarakat ikut dan mau untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.

Di Desa Kuyanga, kelompok tani ini pengaruhnya sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik warga. Kelompok tani Desa Kuyanga pada umumnya mereka melakukan pendekatan kepada warga dengan cara mendatangi secara langsung rumahnya maupun dengan cara mengumumkan untuk ikut serta

dalam kegiatan politik. Ketua kelompok tani ikut sebagai pelaksana pemilihan umum, sebagai seorang pelaksana pastinya perlu mengajak warga untuk berpartisipasi secara aktif. Memberikan kartu pemilih dan juga mengajak warga pada acara rapat desa sebagai bagian perwakilan kelompok tani. Sebagai upaya terwujudnya tindakan politik, kelompok tani ini banyak berdiskusi terkait masalah politik, pembahasannya mulai dari pemilihan umum sampai dengan masalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masalah pertanian. Hal ini dilakukan mereka dengan sesama anggota maupun dengan kelompok tani yang lainnya. Cara kelompok tani untuk mewujudkan tindakan politik dengan sosialisasi ke warga, mengajak secara langsung, dan juga mensosialisasikan kesesama anggota. Pelaksanaan kegiatan politik tentunya tidak bisa lepas dari maksud-maksud yang ingin dicapai. Maksud yang akan dicapai harus dapat dukungan serta partisipasi dari setiap anggota itu sendiri baik secara mental dan juga emosional (Polii, 2021: 7-8). Menumbuhkan suatu kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik bukanlah hal yang mudah, akan tetapi disini sudah dibuktikan oleh kelompok tani di desa Kuyanga.

Literatur yang keempat diambil dari tulisan Lavia Elisa Ortensi dan Veronica Riniolo yang berjudul tentang *Do Migrants Get Involved in Politics? Levels, Forms and Drivers of Migrant Political Participation in Italy*. Di Itali, partisipasi politik para migran masih rendah berbeda dengan penduduk aslinya. Perbedaan antara penduduk asli dan pendatang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Absennya sebagian besar migran dari panggung politik menimbulkan tantangan yang serius bagi demokrasi di Itali. Rendahnya partisipasi migran di Itali serta peran mereka

yang tidak relevan dalam proses pembuatan kebijakan seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian sejalan dengan pelepasan keterlibatan politik migran di berbagai negara Eropa. Tingkat pendidikan, usia dan juga jenis kelamin dan juga penguasaan bahasa juga mempengaruhi dalam partisipasi politik. Partisipasi politik tumbuh seiring bertambahnya usia dan sebagian besar terkait dengan keterikatan dengan Itali sebelum migrasi dan indikator integrasi dan kekayaan baik di tingkat individu (seperti tingkat pemahaman bahasa Itali dan lama tinggal di Itali) dan di tingkat rumah tangga (kepemilikan rumah, kohabitasi dengan penduduk asli Itali, tinggal bersama pasangan dengan anak-anak).

Kepercayaan pada orang lain juga mempengaruhi partisipasi politik yang menunjukkan bahwa juga diantara para migran kita dapat mengamati hubungan tingkat individu yang kuat antara kepercayaan antar pribadi dan partisipasi demokratis yang diamati diantara penduduk asli oleh Almond dan Verba. Partisipasi politik migran sangat penting bagi masyarakat maju dan untuk mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi. Pertama, hambatan bahasa harus diatasi: penekanan pada integrasi bahasa merupakan prasyarat yang diperlukan. Kedua, integrasi tampaknya berhubungan positif dengan kepentingan politik secara keseluruhan, sementara partisipasi langsung juga didorong oleh reaksi terhadap kondisi kehidupan atau ekonomi yang buruk. Terakhir, kesenjangan antara pria dan juga wanita dalam partisipasi politik menunjukkan perlunya pendekatan gender dalam analisis migran (Elisi, Riniolo, 2020: 133–153). Dibutuhkan suatu kerja keras semua elemen masyarakat baik itu

pemerintah, penyelenggara, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik.

Literatur yang terakhir berjudul tentang partisipasi politik masyarakat buruh tani pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kecamatan Lau kabupaten Maros yang ditulis oleh Muhammad Rifki Razak. Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam kemajuan demokrasi ini terlihat dimasyarakat buruh tani yang berada di kecamatan Lau kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Strategi atau cara dalam untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat buruh tani ialah dengan gabungnya warga masyarakat menjadi panitia pemilihan. Selain itu juga menghadiri rapat panitia pemilihan serta rapat dari tim sukses. Ketua komunitas buruh tani ikut rapat dan turut serta mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung terkait pemilihan kepala daerah dan juga mengedukasi, memberikan cara dalam memilih. Selain itu ada juga cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan tentang tatacara mencoblos surat suara dan setelah itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Memberikan hak suara dalam pemilihan umum merupakan sebuah keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Survei yang dilakukan, jumlah petani ada sebanyak 1.427 orang, yang berada di kecamatan Lau hanya 5 orang yang tidak memberikan suaranya dalam pemilihan. Masalah karena tidak ikut memilih yaitu karena masalah kurangnya lembaran surat suara. Dengan adanya ini menunjukkan bahwa, masyarakat buruh tani sangat bersemangat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Banyak warga yang

memberikan hak suaranya sesuai hati nurani dan tanpa ada pengaruh dari orang lain. Ini dilakukan hanya untuk mencari pemimpin yang amanah serta mampu membangun daerah serta mensejahterakan kehidupan buruh tani (Razak, 2020:52-54). Selain mencari pemimpin dan juga mensejahterakan, buruh tani juga mendapatkan bekal ilmu yang berharga kelak bisa diwariskan ke anak cucu.

1.6 Kerangka Teori

Partisipasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*" yang bermaksud pengambilan bagian atau juga pengikutsertaan. Kata "*Participation*" sendiri berawal dari kata "*Participate*" yang mempunyai arti mengikutsertakan. Sejalan dengan arti diatas, partisipasi mempunyai maksud juga turut serta atau berperan serta atau juga keikutsertaan. Definisi partisipasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu: "Hal yang berkenaan dengan atau turut serta dalam suatu kegiatan atau peristiwa serta berperan aktif dalam sebuah kegiatan (Kusmanto, 2014:85). Partisipasi sendiri merupakan masalah hubungan kekuasaan atau hubungan ekonomi politik yang tidak melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Di negara demokrasi, kadang kalanya pemerintah harus melakukan intervensi terhadap warganya dan kadang kalanya juga untuk menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setempat, semua ini tergantung konteksnya. Partisipasi adalah suatu proses adanya hubungan interaksi yang baik antar *stakeholders* sehingga terjadi sebuah kesepakatan-kesepakatan dan sebuah tindakan yang sifatnya inovatif. Bisa juga terciptanya sebuah proses *deliberatif*, dimana ada ruang untuk dapat

mendengarkan, refleksi, belajar serta memulai suatu tindakan bersama (Fadil, 2013:254-255). Selain itu partisipasi juga mempunyai makna secara harfiah.

Partisipasi secara harfiah mempunyai arti keikutsertaan, dalam memaknai partisipasi dikonteks politik dapat diterjemahkan sebagai wujud keikutsertaan warga negara diberbagai proses politik yang ada. Partisipasi warga yang dimaksud yaitu dengan kemauan warga sendiri untuk melihat, mengkritisi dan juga terlibat aktif disetiap proses politik. Partisipasi adalah ikutnya seseorang, baik secara mental maupun emosional dalam memberikan sumbangan pada proses pembuatan kebijakan terutama masalah dimana keterlibatan secara pribadi orang tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab (Haluana, Dkk, 2020: 48). Sumbangan tidak hanya berbentuk materi melainkan juga non materi yaitu tenaga dan juga fikiran.

Politik sendiri adalah sebuah usaha untuk mencapai sebuah kehidupan yang baik. Umumnya dapat dijelaskan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk membuat aturan-aturan yang bisa diterima baik oleh sebagian maupun semua warga, untuk menuju masyarakat ke arah yang lebih baik dan juga harmonis dalam menjalani kehidupan. Usaha dalam mendapatkan *the good life* ini sangat bermacam-macam wujudnya yaitu menyangkut proses dari penentuan sistem dan juga cara melakukan tujuan tersebut. Masyarakat mengambil sebuah keputusan terkait apakah yang menjadi sebuah tujuan dari sistem politik itu serta hal ini menyangkut pada pilihan antara berbagai alternatif serta urutan prioritas dari sebuah tujuan yang sudah ditentukan (Budiardjo, 2008:13-15).

Studi partisipasi politik pada dasarnya adalah bagian dari sebuah pendekatan tingkah laku (behavioralism) diranah ilmu politik, bagian terpenting didalam studi

pembangunan politik. Pembangunan politik dimaksudkan sebagai jawaban barat dalam perannya di negara dunia ketiga. Pendekatan mengenai partisipasi politik tidak menjadi milik barat semata dan juga terjadi di barat akan tetapi negara dunia ketiga yang paling sering dijadikan objek dan juga subjek didalam studi ini. Partisipasi politik pada umumnya merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut secara aktif didalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan negara dan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Darmayadi, 2011:61-62).

Partisipasi politik digunakan disetiap kegiatan orang disemua tingkatan sistem politik. Contohnya adalah seorang pemilih atau konstituen atau pemberi hak suara ikut berpartisipasi dengan cara memberikan suaranya, terus seorang Menteri Luar Negeri berpartisipasi untuk menetapkan sebuah kebijaksanaan terkait luar negeri. Maksud dari istilah diatas lebih cocok diterapkan pada orientasi politik ketimbang aktivitas politik mengingat warga negara ikut berpartisipasi dan menaruh minat politik. Partisipasi politik sebuah tindakan suka rela yang sukses maupun gagal, yang terorganisir maupun tidak, sewaktu-waktu atau terus menerus, dengan menggunakan jalan yang sah maupun jalan yang tidak sah untuk mempengaruhi kebijakan dari sebuah pemerintahan. Ini dilakukan pada tingkatan pemerintahan nasional, daerah maupun tingkatan lokal (Suharyanto, 2014:153). Ada juga pengertian lain dari partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan dari seorang warga negara baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan masalah kebijakan pemerintah. Partisipasi politik juga dapat dilakukan secara

sendiri-sendiri maupun berkelompok dan dilakukan dengan cara spontan maupun dengan mobilisasi. Dilain sisi juga merumuskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap individu maupun kelompok untuk berperan secara aktif didalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah (Wardhani, 2018:59). Partispasi politik juga sebuah tindakan yang dibuat oleh masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang dalam banyak kasus dan pada akhirnya diambil alih oleh pemerintah (Van Deth, 2001:4). Partisipasi politik merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintah dan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil (Boulding, Houlzner, 2021:25). Jadi sudah jelas bahwa partisipasi politik sebuah kegiatan individu maupun kelompok yang ada hubungannya dengan politik secara aktif.

Tentunya dalam partisipasi politik mempunyai bentuk-bentuk sendiri, diantaranya:

1. *Electoral Activity* merupakan sebuah kegiatan maupun sebuah aktifitas yang ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilihan umum. Dalam mengidentifikasi ini beberapa kegiatan partisipasi bisa berupa, terlibat dalam kampanye, menyumbang pendanaan partai politik, menjadi relawan serta menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum.
2. *Lobbying* merupakan sebuah kegiatan baik dalam bentuk kelompok maupun individu dalam memberikan pengaruh disemua proses dalam menentukan kebijakan publik. Cara yang dilakukan adalah dengan negosiasi serta bertemu

dengan pejabat pemerintahan dan politik. Aktivitas ini dilakukan supaya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat berpihak kepada kepentingan mereka maupun kelompoknya.

3. *Organizational Activity* merupakan sebuah keterlibatan warga negara kedalam organisasi, baik itu sebuah organisasi sosial ataupun organisasi politik. Kelompok organisasi ini kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan supaya kebijakan yang sudah mereka buat dapat dimasukkan dan menjadi sebuah agenda bersama.
4. *Contacting* merupakan sebuah kegiatan langsung bagi masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya terkait permasalahan publik. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan datang secara langsung, mengirim surat, menelepon, membuat dan tandatangan sebuah petisi dan juga sejenisnya yang bertujuan mempengaruhi kebijakan.
5. *Violence* merupakan sebuah aktivitas yang memakai tekanan dan paksaan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Langkah-langkah ini bisa dilihat dengan corat-coret, aksi turun ke jalan dan ancaman yang ditujukan untuk melaksanakan perubahan secara langsung (Gustomy, 2017:52-53). Tapi cara-cara ini masih dalam koridor hukum dan juga sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan *Violence* sendiri dibedakan menjadi dua yaitu konvensional dan non-konvensional. Konvensional sendiri seperti kegiatan pemilihan umum dan yang non-konvensional seperti pemogokan yang tidak sah dan cenderung melawan hukum (Munawir, 2012:138). Tentunya yang dimaksud dengan *Violence* disini adalah yang berbentuk konvensional.

Menurut Weimer ada lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi.

Modernisasi dalam segala bidang berdampak pada partisipasi warga kota contohnya buruh, pedagang dan juga kaum profesional untuk ikut berpartisipasi dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dan menuntut kehadiran didalam kekuasaan politik yang merupakan bentuk kesadarannya bahwa mereka bisa mempengaruhi perubahan nasibnya sendiri.

2. Adanya perubahan-perubahan kelas sosial.

Perubahan kelas sosial baru merupakan akibat dari adanya kelas menengah dan pekerja baru yang makin banyak. Era industrialisasi dan modernisasi seperti saat ini menyebabkan datangnya sebuah persoalan, siapa yang pantas untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan politik yang berdampak pada perubahan pola partisipasi politik itu sendiri.

3. Kaum intelektual yang mempengaruhi dan meningkatnya komunikasi massa.

Datangnya sebuah ide baru yaitu masalah nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme berakibat pada datangnya tuntutan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Komunikasi dapat membantu menyebarkan seluruh maupun sebagian ide kepada masyarakat secara luas. Dampak dari semua itu adalah masyarakat yang belum maju tetap menerima ide tersebut dengan cepat dan pada akhirnya berujung pada tuntutan rakyat.

4. Konflik didalam elit politik.

Elit politik yang berkompetisi dalam merebut kekuasaan sering kali dalam menggapai kemenangan dilaksanakan dengan cara menggerakkan dan mencari dukungan massa dan menyuarakan ide partisipasi. Efek yang muncul dari tuntutan masalah hak-hak rakyat, baik berupa hak asasi manusia, hak keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu lainnya.

5. Campur tangan pemerintah semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi serta kebudayaan.

Semakin melebarnya ruang lingkup aktivitas pemerintah dapat merangsang tumbuhnya sebuah tuntutan yang terorganisir untuk ikut dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah perbuatan pemerintah (Suriyanto, 2018:19-20). Mulai dari masalah sosial, ekonomi dan juga masalah kebudayaan.

Sedangkan untuk pemilihan diluar negeri sendiri ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya:

1. Pertama, berpartisipasi karena sebuah ketidaktahuan dari pemilih luar negeri. Mereka tidak mengetahui siapa calon yang akan mereka pilih, walaupun tahu, langkah mereka terbatas.
2. Kedua, pemilih diluar negeri tidak bisa mengetahui pemilihan umum yang berlangsung untuk memilih siapa dan apa.
3. Ketiga, pengaruh pada rendahnya partisipasi pemilih diluar negeri adalah sebuah mekanisme dan durasi yang diberikan oleh panitia sangat pendek pada saat pemungutan suara dilokasi pemungutan suara luar negeri. Menurut

informasikan, calon pemilih yang berdatangan ke lokasi pemungutan suara luar negeri dengan membawa pasport sangat banyak, akan tetapi waktu yang tersedia sangatlah pendek yaitu satu jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup. Melihat kondisi yang demikian banyak para calon pemilih yang tidak jadi memilih dikarenakan waktunya yang terlalu sempit.

4. Keempat, melihat prosedur dalam penggunaan *dropbox* bagi pemilih luar negeri yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk datang ke tempat pemungutan suara luar negeri. Penggunaan *dropbox* ini di beberapa lokasi cukup efektif akan tetapi penggunaan *dropbox* ini tidak 100% atau sepenuhnya berhasil.
5. Kelima, menghambat pemilih di luar negeri dalam menyalurkan hak pilihnya merupakan majikan tidak memberikan izin kepada pekerja Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Nurhasim, 2014:66-67). Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Didalam partisipasi politik tidak membedakan orang, asalkan sudah memenuhi persyaratan maka boleh. Pentingnya partisipasi politik yaitu; kebebasan, kemajuan dan kemandirian rakyat dalam mengefektifkan setiap kegiatan politiknya. Suatu usaha untuk mencapai kebaikan tertinggi dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran (Iskandar,2017). Kebebasan setiap warga negara yang sudah dijamin sama negara. Bukan hanya sebatas undang-undang, tetapi juga kebebasan setiap warga negara Indonesia yang dilindungi juga sama konstitusi. Semua ini karena Indonesia mengacu pada sistem demokrasi konstitusional. Dua hal yang perlu dicermati yaitu, bebas tanpa ada tanggungjawab

serta bebas yang bertanggungjawab. Bebas tanpa bertanggungjawab yaitu sesuka hatinya, contoh balapan di jalan umum, menimbulkan suara gaduh sampai tengah malam pada lingkungan perumahan. Bebas bertanggung jawab adalah sebuah kebebasan yang pada dasarnya untuk mengekspresikan diri sendiri dan tidak merepotkan orang lain (Kurniawan, 2015:100-101). Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang harus menghormati kebebasan yang dimiliki oleh orang lain jika tidak maka ini akan menjadi masalah baru dimasyarakat.

Mandiri adalah suatu perilaku yang didapatkan secara berbarengan melalui proses dan dialami individu dalam perkembangannya, dalam menuju ke proses kemandirian, individu tersebut belajar dalam menghadapi banyak situasi di lingkungan sosialnya pada akhirnya mampu berpikir serta mengambil sebuah tindakan yang pas untuk mengatasi apapun itu situasinya (Sa'diyah, 2017:32). Kemandirian dalam partisipasi politik yaitu suatu sikap untuk memilih tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penentuan sikap tersebut muncul dari diri sendiri bukan karena dorongan orang lain. Pada hakikatnya setiap manusia menginginkan sebuah kemajuan di segala bidang, oleh sebab itu mereka tidak boleh apatis terhadap politik. Kemauan politik yang efektif akan membuat rakyat semakin maju dan partisipasi politik salah satu jalan yang harus dilalui.

Salah satu negara yang memakai sistem demokrasi diantaranya adalah Indonesia. Partisipasi menjadi salah satu agenda yang penting dalam hal proses pemilihan umum, terlebih dalam hal tingkat kehadiran dan tindakan warga negara untuk memakai hak pilihnya. Bagian dari keberlanjutan demokrasi, angka partisipasi pemilih pastinya akan memberikan efek pada siapa yang kelak akan

memenangkan pertarungan dalam pemilihan umum dan dikasih kepercayaan untuk mengatur hajat hidup orang banyak.

Partisipasi politik merupakan suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan peran serta rakyat langsung ataupun tak langsung yang bermaksud untuk memengaruhi keputusan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pendidikan politik bagi rakyat dipemilihan umum harapannya dapat dijadikan proses pembelajaran untuk mengetahui dan juga memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang tergolong minim membuat kelompok ini rawan dijadikan sasaran untuk serangan politik uang maupun dimobilisasi oleh kepentingan politik tertentu. Bentuk dari partisipasi politik masyarakat di pemilihan umum dengan pemberian hak suara, ikut dalam kampanye, serta berdiskusi maupun membicarakan masalah politik.

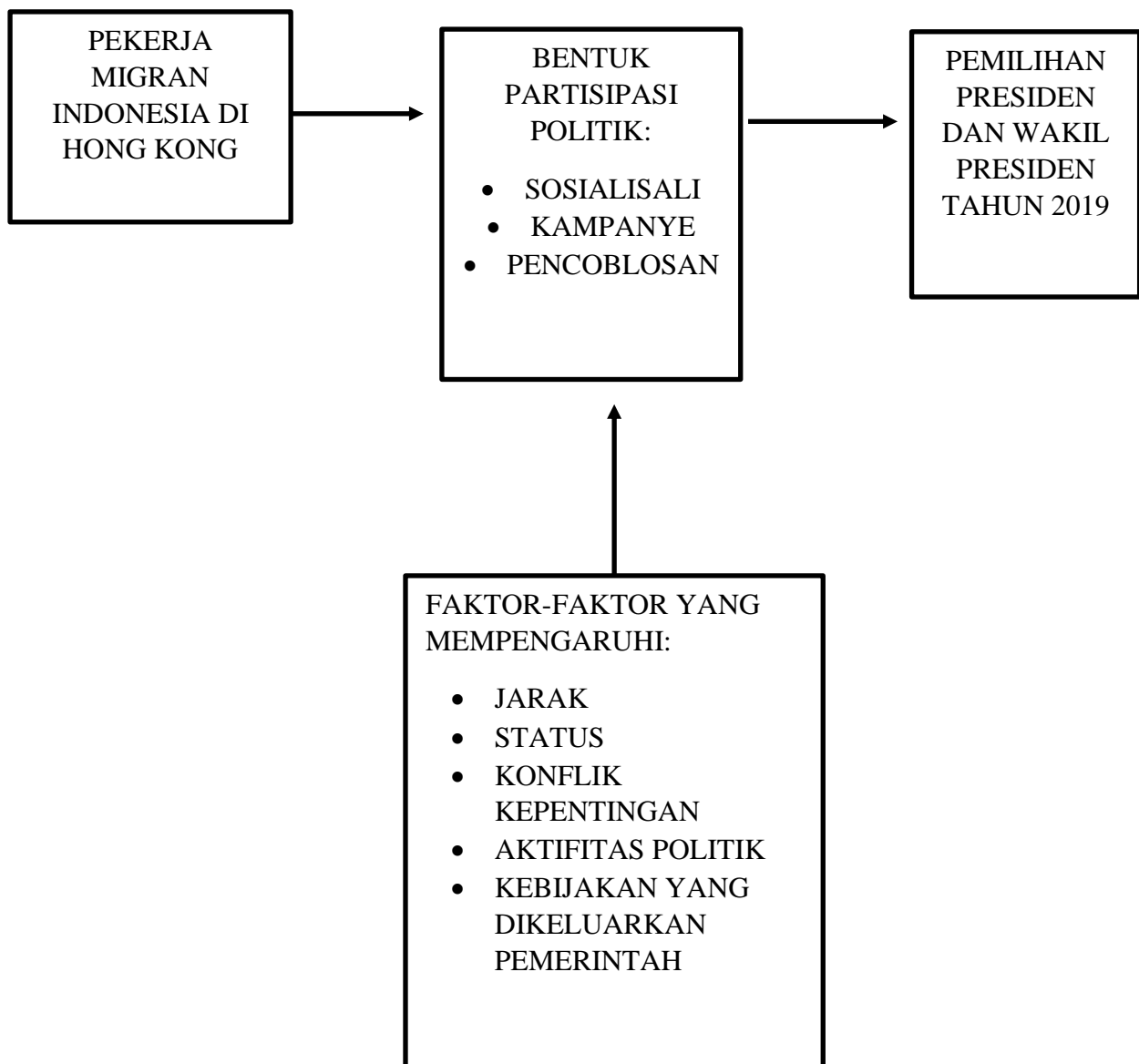
Partisipasi politik adalah tolak ukur dari jalannya suatu demokrasi dalam sebuah negara. Logika yang harus dibangun yaitu, tingginya tingkat dan juga intensitas partisipasi politik rakyat dalam suatu negara maka bisa semakin demokratis negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Bentuk dari partisipasi politik sendiri yang sangat penting adalah partisipasi politik rakyat dalam sebuah pemilihan umum. Ini semua terjadi karena pemilihan umum adalah komponen perubahan kedaulatan menjadi sebuah kewenangan. Rakyat mempunyai kedaulatan, melalui jalan pemilihan umum untuk memilih wakil yang kelak akan duduk di jabatan eksekutif maupun legislatif dan mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang sifatnya umum dan meyangkut seluruh kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum, pada khususnya

dalam penyaluran suara (voting) sangatlah penting serta bermanfaat bagi demokrasi suatu negara.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan penjelasan pada sub bab kerangka teori, yang mana menjelaskan terkait dengan partisipasi politik. Kerangka teori saat diturunkan menjadi poin-poin mengenai partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019. Operasionalisasi konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1 Operasionalisasi Konsep



1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berbicara dan mempersoalkan tatacara dalam melaksanakan sebuah penelitian. Metode penelitian ada tiga yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif dan metode campuran. Sedangkan Creswell (2016) menyebutkan bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya. Creswell membagi tiga metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan *mix-methods* (campuran kualitatif dan kuantitatif).

Berdasarkan penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Mix Method, yaitu suatu langkah penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut (Creswell, 2010) strategi ini merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode ke metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan melalui *interview* terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif. Subyek penelitian adalah pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Melihat problematika yang terjadi dilapangan penulis juga menggunakan batasan-batasan baik lokasi, informasi, peristiwa dan rentang waktu.

1.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dipenelitian ini dilakukan bukan secara tatap muka akan tetapi dalam pengambilan sampel dilakukan dengan metode survey online. Dalam pengambilan data dilaksanakan sampai selesai sehingga bisa maksimal hasilnya. Metode pengambilan survey secara online selain mudah dan murah juga melihat kondisi kesehatan dunia saat ini yang terserang pandemi covid-19.

1.8.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah warga negara Indonesia yang saat pemilihan berlangsung berada di Hong Kong dan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau sejenisnya yang disebut juga sebagai pekerja migran Indonesia. Sedangkan sampel sendiri adalah bagian dari populasi tersebut.

Sampling: proses penentuan atau proses memilih n buah elemen atau objek atau unsur dari populasi yang ukurannya N . Elemen: merupakan sesuatu dan menjadi obyek dari penelitian, bisa berupa orang maupun benda yang terkena pengukuran. Populasi (N): jumlah secara lengkap dari semua elemen atau sejenisnya tetapi masih bisa dibedakan menurut karekteristiknya. Sample (n): adalah bagian dari sebuah populasi. Elemen bagian dari sampel, merupakan barisan populasi saat sampel diambil. Jika N jumlah elemen populasi, dan n jumlah elemen sampel, maka $n < N$. Kerangka Sampel: merupakan daftar yang mengakomodasi seluruh elemen maupun anggota populasi, dasar dari penarikan sampel random. Statistik: merupakan sebuah bilangan yang didapatkan melalui proses perhitungan dengan sekelompok data yang berasal dari sampel. Parameter: merupakan sebuah

bilangan yang didapatkan melalui sebuah proses perhitungan terhadap sekelompok data yang berawal dari populasi (Setiawan, 2005: 1-2).

Tabel 1.1 Jumlah Keberangkatan pekerja migran Indonesia ke Hong Kong

No	Negara Tujuan	Tahun	Jumlah
1	Hongkong	2015	15.322
2		2016	14.434
3		2017	69.182
4		2018	73.917
5		2019	70.840
Total			243.695

Sumber: Data BNP2TKI tahun 2018 dan BP2MI tahun 2020

Rumus perhitungan yang digunakan adalah rumus dari slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + N \times e \times e)}$$

Artinya:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas error (10% atau 0,10)

$$n = \frac{243.695}{1 + (243.695 \times 0,10 \times 0,10)}$$

$$n = \frac{243.695}{1 + 2.436,95}$$

$$n = \frac{243.695}{2.437,95}$$

$$n = 99,95$$

Berdasarkan sebuah rumus Slovin diatas, diperoleh hasil sampel berjumlah 99,95 dan dibulatkan menjadi angka 100 sampel. Pada penelitian mengenai “Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019” untuk mewakili populasi yang ada, maka responden yang dibutuhkan sebanyak 100 responden.

1.8.3 Pengumpulan Data

Merebaknya pandemi covid-19 diseluruh dunia harus mengubah cara kerja manusia salah satu dalam teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebar kuisisioner secara online. Kuisisioner online dalam penelitian ini merupakan susunan daftar pertanyaan yang relevan dengan subyek penelitian, dan dibagikan ke setiap sampel yang sudah diputuskan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan didalam survey online sifatnya terbuka dan tertutup, ini digunakan semata-mata untuk mendapatkan data yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada kuisisioner online juga terdapat biodata dari masing-masing sampel seperti, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga dari mana mereka berasal.

Dalam penyebaran kuisisioner secara online ini, peneliti sudah mempunyai data responden yaitu nama dan juga nomor whatsapp. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menghubungi responden untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian tersebut. Terakhir peneliti membagikan link kuisisioner online yang berbentuk google form melalui media nomor whatsapp maupun whatsapp grup untuk diisi oleh para responden.

1.8.4 Pengolahan Data

Sesudah mendapatkan sebuah data dari penelitian lapangan langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pengolahan data terlebih dahulu sebelum dilakukan ketahap selanjutnya yaitu analisis. Pengolahan data merupakan tahapan dimana sebelum melakukan aktifitas analisis data dengan urutan mempersiapkan dan selanjutnya mengklasifikasikan sesuai dengan format yang diinginkan untuk kebutuhan analisis data. Data yang didapatkan bisa diolah melalui dua cara, yaitu:

1. *Coding*, merupakan sebuah pengolahan data dengan cara memberi tanda maupun kode khusus pada kategori data masing-masing.
2. *Editing*, cara pengolahan data dengan melakukan proses editing sesuai dengan kebutuhan untuk analisis data (Asmuni, 2021: 38-39).

1.8.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari data secara rinci dari data yang didapatkan dari hasil survey secara online. Cara mengelompokkan data ke dalam masing-masing kategori, menjelaskan ke dalam unit tertentu, membuat komposisi, memasukan ke dalam pola, memilih mana saja yang penting dan yang dipelajari serta membikin sebuah kesimpulan hingga mudah mengerti oleh diri sendiri dan juga orang lain (Sugiyono, 2007). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif (data frekuensi dan tabel silang) dengan bantuan software *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), Dalam statistik ini dikenal dengan istilah group membership model.